

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TANSLITASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kerangka Fikir.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PENGADAAN TANAH	
UNTUK KEPENTINGANUMUM	17
A. Tinjauan Pertanahan Dalam Hukum Ekonomi Islam	17
1. Pengertian Tanah secara Etimologi	17
2. Latar Belakang Hukum Pertanahan	17
3. Pengertian Pengadaan Tanah	19
4. Hak Kepemilikan Tanah	21
B. Kepemilikan Tanah dan Implikasinya	23
C. Cara –Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah.....	22

D. Syarat- Syarat Membuka Lahan	31
E. Pendistribusian Tanah.....	32
F. Kepentingan Umum.....	33
G. Ganti Kerugian.....	31
H. Musyawarah Terhadap pengadaan Tanah	36
I. Teori Keadilan.....	37

BAB III UPA TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

UMUM	54
A. Latar Belakang Pengadaan Tanah Di Indonesia	54
1. Pengertian tanah.....	59
2. Pengertian Pembangunan	60
3. Pengadaan Tanah	62
4. Musyawarah untuk menentukan Ganti Rugi	76
B. Hak Atas Tanah dan Pencabutan /Pelepasan.....	79
1. Pengertian Hak Atas Tanah	79
2. Macam –macam Hak Atas Tanah	79
3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	81
C. Teori Keadilan	82

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data	96
1. Profil Kabupaten Lampung Selatan	96
2. Sejarah Kewenangan Dan Politik Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	99
3. Kewenangan pemerintah daerah/kota dalam pengadaan tanah	107
4. Pelaksanaan ganti rugi pengadaa tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan	109
5. Aturan Perpres dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ..	111
6. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Tentang pertanahan dalam Hukum UPA	112

7. Dampak pembebasan dalam kehidupan Rakyat	116
8. Otoritas Pemerintah demi Kemaslahatan dibidang Pertanahan dalam Sorotan Fiqih	120
B. Analisis Data	90
1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	90
2. Perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan utuk kepentingan umum di Kabupaten Lampung Selatan	90
3. Prosedur Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum di Kabupaten Lampung Selatan	95
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	122
B. Saran-Saran	124
LAMPIRAN –LAMPIRAN	